



**Judul** : APBN - Saldo Lebih Dipakai untuk Kurangi Utang  
**Tanggal** : Selasa, 22 Maret 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 10

## APBN

# Saldo Lebih Dipakai untuk Kurangi Utang

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah akan memanfaatkan saldo anggaran lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk mengurangi pembiayaan atau utang. Pemanfaatan ini diharapkan bisa efektif memperkecil ruang defisit anggaran yang pada tahun 2023 ditargetkan ada di bawah 3 persen produk domestik bruto.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (21/3/2022), Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, saldo anggaran lebih (SAL) dari APBN 2022 akan dioptimalkan untuk mengurangi pembiayaan pada tahun anggaran 2023.

Strategi ini akan menopang upaya pemerintah mengejar target konsolidasi fiskal berupa defisit APBN di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). "SAL bisa digunakan, tergantung pada kebutuhan. Dalam hal ini akan lebih banyak digunakan untuk mengurangi penerbitan obligasi," ujar Hadiyanto.

Kementerian Keuangan akan terus melakukan pemantauan kondisi SAL dan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun ini seiring kondisi penerimaan negara yang sedang berada dalam tren positif. Dengan ketercukupan SAL dan silpa, beban utang dapat dikurangi.

Dari sisi penerimaan, lanjutnya, adanya Undang-Undang

**Kenaikan harga minyak mentah tiap 1 dollar AS per barel akan meningkatkan anggaran subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun.**

Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan meningkatkan basis pajak. Dalam regulasi tersebut juga ada kenaikan tarif, misalnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.

Begitu juga dengan tarif Pajak Penghasilan (PPH), wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar akan dikenai tarif 35 persen dari sebe-

lumnya 30 persen.

Selain itu, Program Pengungkapan Sukarela tahun ini juga akan menopang penerimaan negara. Sebanyak 25.460 wajib pajak telah mengikuti program ini dalam 79 hari pelaksanaannya. Jumlah penerimaan negara dari PPh mencapai Rp 3,65 triliun, dengan nilai harta bersih yang dilaporkan seluruh peserta mencapai Rp 35,46 triliun.

Hadiyanto mengatakan, untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, Kementerian Keuangan juga berupaya mendorong percepatan realisasi anggaran (K/L). Strategi ini dapat dijalankan melalui perbaikan perencanaan belanja seluruh K/L. "Kami juga meminta seluruh K/L meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, serta meningkatkan *monitoring* serta pengawasan internal," ujarnya.

Secara terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M Rachbini, mengatakan, defisit APBN tahun ini berpotensi melebar karena lonjakan harga minyak mentah dunia. Kondisi ini tentunya akan mempersempit ruang SAL atau silpa di akhir tahun.

Eisha memperkirakan kenaikan harga minyak mentah tiap 1 dollar AS per barel akan meningkatkan anggaran subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, kompensasi kepada Pertamina Rp 2,65 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 295 miliar. Di sisi pendapatan negara, kemungkinan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya akan naik masing-masing Rp 800 miliar dan Rp 2,2 triliun sehingga defisit tetap berpotensi melebar.

"APBN perlu dikelola dengan tepat dan efisien, dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," kata Eisha. (DIM)